



Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengendalian Inflasi, Kebijakan Moneter Dan Fiskal

Muh Abdul Ghofur

meighofur@gmail.com

Yuliani

yuliani@iainkediri.ac.id

Binti Mutafarida

bmutafarida@iainkediri.ac.id

Alamat: Institut Agama Islam Negeri Kediri

Korespondensi penulis: meighofur@gmail.com

Abstrak. *The economic development of a country, including in Indonesia, cannot be separated from the monetary and fiscal policies adopted by each country concerned. However, the monetary and fiscal policies adopted by each country vary depending on the real economic conditions, the direction and development objectives to be achieved. In principle, the management of monetary and fiscal policies aims to maintain the inflation rate by regulating the circulation of money and interest rates which tend to increase in society. The purpose of this research is to find out how the government controls inflation, monetary and fiscal, and their impact on the economy from an Islamic macroeconomic perspective. The method used is library research method and the data used is secondary data which is in accordance with a number of relevant literature. As an effort to overcome inflation, monetary and fiscal policies, the government needs to carry out macroeconomic policies in relation to achieving the inflation target and economic growth. Thus, every country needs to maintain economic stability in accordance with the challenges it face.*

Keywords: *Control; Inflation; Monetary; Fiscal; Islamic Macroeconomics*

Abstrak. Perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk pula di Indonesia tentu tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh oleh setiap negara yang bersangkutan. Tetapi kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh berbeda-beda oleh setiap negara bergantung kepada kondisi ekonomi riil, arah, dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dan suku bunga yang cenderung semakin bertambah di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengendalikan inflasi, moneter, dan fiskal, serta dampaknya terhadap perekonomian dalam perspektif ekonomi makro Islam. Metode yang dipergunakan menggunakan metode library research serta data yang dipergunakan yaitu data sekunder yang sesuai dengan sejumlah literatur yang relevan. Sebagai upaya untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah perlu melakukan kebijakan ekonomi makro dalam kaitannya dengan pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian setiap negara perlu menjaga stabilitas ekonomi sesuai dengan tantangan yang dihadapinya.

Kata Kunci: Inflasi; Moneter; Fiskal; Ekonomi Makro Islam

PENDAHULUAN

Tingkat harga adalah indikator penting dalam sistem ekonomi modern, karena membantu menjaga keseimbangan dalam alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat merusak atau menghilangkan fungsi indikator ini, menyebabkan distorsi harga. Hal ini menyulitkan perencanaan dan mengurangi motivasi masyarakat serta dunia usaha untuk menabung dan berinvestasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata adalah tujuan utama pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita adalah salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat, karena mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi dan

tingkat kemakmuran secara riil. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga merupakan parameter penting untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Muda et al., 2019)

Dalam sistem perekonomian modern, target inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah. Penetapan target ini diatur oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, target inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.010/2017, target inflasi untuk tahun 2019-2021 masing-masing ditetapkan sebesar 3,5%, 3,0%, dan 3,0%, dengan deviasi $\pm 1\%$ (BI, 2019). Inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor penawaran atau kejutan, seperti kenaikan harga minyak dunia dan gangguan panen atau banjir. (Astuti & Eddyono, 2021) Dari segi bobot dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK), bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices, yang mencakup sekitar 40% dari bobot IHK. Pengendalian inflasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah karena beberapa alasan. Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan, mengurangi tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara berkembang, menyebabkan defisit neraca perdagangan, dan meningkatkan utang luar negeri. (Roziyah et al., 2023)

Stabilitas ekonomi suatu negara antara lain tercermin dari stabilitas harga, yang berarti tidak adanya fluktuasi harga yang signifikan yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen, yang pada akhirnya dapat merusak perekonomian. Kenaikan harga yang menyebabkan inflasi dapat diklasifikasikan, dan jika kenaikan harga terjadi secara perlahan, inflasi tersebut disebut '*Creeping Inflation*'. (Ardiansah, 2020) Namun, jika harga meningkat dengan cepat, kondisi tersebut disebut '*Hyperinflation*', di mana inflasi melebihi 50 persen per bulan atau lebih dari 1 persen per hari (Mankiw, 2003). Pengendalian inflasi menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang tepat akan menghasilkan stabilitas makroekonomi yang baik, yang pada gilirannya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta keadilan ekonomi dan sosial. Masalah yang akan dikaji lebih lanjut adalah bagaimana mengendalikan inflasi, serta dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap perekonomian dari perspektif ekonomi makro Islam.

KAJIAN TEORI

a. Inflasi,

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum cenderung naik secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ini mengakibatkan penurunan nilai uang atau daya beli uang, sehingga konsumen perlu membayar lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Inflasi sering diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang memantau perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang sering dibeli oleh konsumen. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk permintaan yang tinggi, biaya produksi yang meningkat, atau peningkatan jumlah uang beredar dalam perekonomian. (Fitria & Anwar, 2020)

b. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara, biasanya oleh bank sentral, untuk mengatur dan

- mengendalikan pasokan uang, suku bunga, dan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas harga, menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan mempromosikan stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan moneter meliputi penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan regulasi terkait perbankan dan lembaga keuangan lainnya. (Sari et al., 2024)
- c. Kebijakan fiskal
- Kebijakan fiskal adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan fiskalnya untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Ini mencakup pengaturan tingkat pajak, pengeluaran pemerintah, serta pengelolaan utang publik. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Instrumen kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur, subsidi, pajak, dan kebijakan pengelolaan utang. (Batin, 2022)
- d. Ekonomi makro Islam
- Ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini berlandaskan pada ajaran agama Islam dan hukum-hukum syariah yang mengatur aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi makro Islam memperhatikan aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang adil, penghindaran riba (bunga), pemenuhan kebutuhan sosial, dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam transaksi ekonomi. Tujuan ekonomi makro Islam adalah menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Waasi, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kajian literatur tentang pengendalian inflasi, kebijakan moneter dan fiskal, serta dampaknya terhadap perekonomian dari perspektif ekonomi makro Islam. (Firmansyah et al., 2021) Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menemukan rumusan konseptual tentang pengendalian inflasi, kebijakan moneter dan fiskal, serta dampaknya terhadap perekonomian dalam perspektif ekonomi makro Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan akhir yang memperkuat dan mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Makro

Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan target tersebut. Salah satu langkah pengendalian inflasi untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Saiyed, 2021) Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diberlakukan, target inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun, setelah UU tersebut, target inflasi ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia difokuskan pada pengelolaan tekanan harga yang

berasal dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran.

Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespons kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor kejutan yang bersifat sementara, karena faktor-faktor ini akan hilang seiring waktu. Menurut Gregory Mankiw (2003), salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika pemerintah mencetak dan/atau mengedarkan uang terlalu banyak, nilai uang tersebut akan turun. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Ada dua kata kunci dalam pengertian inflasi: pertama, kenaikan harga secara umum; kedua, kenaikan yang terus menerus. Dalam inflasi, harus ada unsur kenaikan harga secara umum (Suseno, 2009). Pada prinsipnya, inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang terkait dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, kelebihan likuiditas di pasar yang mendorong konsumsi atau spekulasi, dan gangguan dalam distribusi barang (Astiyah, 2009).

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan mempengaruhi harga barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). (Simanungkalit, 2020) Perubahan IHK dari waktu ke waktu mencerminkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (Fuadi, 2020) Selanjutnya, BPS memantau perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan di berbagai kota, baik di pasar tradisional maupun modern. Dalam membahas inflasi, penting untuk mempertimbangkan bentuk-bentuk inflasi, seperti inflasi merayap dan inflasi yang terus berkelanjutan, yang dianggap serius jika melebihi 5%. Pemerintah berupaya mengatasi inflasi jenis ini. Meskipun *zero inflation* atau inflasi nol persen menjadi tujuan pemerintah, mencapai hal ini dalam perekonomian nasional sangat sulit. Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah perlu memastikan inflasi tidak melebihi 5%. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. (Lumy et al., 2021)

Pengendalian Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro

Pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh dua institusi berbeda haruslah selaras dan tidak saling bertentangan, keduanya harus menyesuaikan kebijakan yang dibuat. Salah satu tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini bertujuan untuk mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan meliputi pengurangan pengeluaran dan peningkatan pajak individu serta perusahaan. Kedua langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga (Sukirno, 2016). Sebagai bagian dari upaya mengatasi inflasi, Bank Indonesia telah mengimplementasikan suku bunga acuan baru yang menggantikan BI Rate, yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang mulai berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. (Palapa et al., 2021)

Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan praktik umum di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter terus disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dapat dengan cepat

memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil, karena sebagai acuan baru, instrumen ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan suku bunga pasar uang. Instrumen ini bersifat transaksional atau diperdagangkan di pasar, serta mendorong pendalaman pasar keuangan, terutama dalam penggunaan instrumen repo. Sesuai dengan prinsip implementasi reformulasi, perubahan ini tidak mengubah arah kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan, BI Rate dan BI 7-Day Repo Rate, berada dalam struktur suku bunga yang sama untuk mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya. Perbedaannya hanya terletak pada tenor instrumen, di mana BI Rate setara dengan instrumen moneter 12 bulan, sedangkan BI 7-Day Repo Rate setara dengan instrumen moneter 7 hari (BI, 2019). Paling tidak ada tiga dampak utama yang diharapkan dengan dipergunakannya instrumen BI 7-day (reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru yaitu (BI, 2019):(Palapa et al., 2021)

- a. Mekuatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate hari sebagai acuan utama di pasar keuangan.
- b. Meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan.
- c. Terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan sampai 12 bulan.

Kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi menjadi terbatas ketika menghadapi kejutan besar seperti kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008, yang menyebabkan lonjakan inflasi. Mengingat laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kejutan tersebut, pencapaian target inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral. Lebih lanjut, karakteristik inflasi Indonesia yang rentan terhadap kejutan dari sisi penawaran memerlukan kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter adalah memastikan bahwa jumlah uang yang beredar dalam ekonomi sesuai dengan kebutuhan, sehingga transaksi perdagangan dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan tekanan inflasi.(Ariani, 2022) Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengevaluasi kebijakan moneter termasuk jumlah uang beredar, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga dapat mempengaruhi investasi di sektor industri, yang pada gilirannya akan mendorong produksi. Nilai tukar juga dapat memengaruhi harga produk dan input produksi, serta perdagangan produk industri baik di tingkat domestik maupun internasional. Jika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, ini disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif, sedangkan jika jumlah uang beredar dikurangi, ini disebut sebagai kebijakan moneter kontraktif (Budiyanti, 2014). Dalam konteks kebijakan moneter yang diterapkan saat ini, terdapat perbedaan dengan sektor ekonomi Islam, di mana instrumen kebijakan moneter yang digunakan sekarang tidak ditemukan pada awal perkembangan sistem perbankan Islam. Sebagai gantinya, salah satu instrumen yang digunakan adalah operasi pasar terbuka, yang melibatkan jual beli surat berharga. Meskipun operasi pasar terbuka tidak ada dalam sejarah ekonomi Islam pada awal perkembangannya, sistem yang diterapkan oleh pemerintah telah menciptakan instrumen secara otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter terkait dengan konsumsi, tabungan, investasi, dan perdagangan (Karim, 2004).

Dalam teori makro ekonomi kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah

penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah merancang porsi yang pas antara penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai kestabilan ekonomi. Diantara beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain (Triwahyuni, 2021):

- a. Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga.
- b. Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu.
- c. Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu. Dalam arah kebijakan bidang moneter Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Tujuan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah mengalami perubahan melalui amandemen yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan amandemen terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. (Mahardika, 2020) Ada dua aspek terkait dengan kestabilan nilai rupiah: pertama, kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi; kedua, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang. Kestabilan nilai tukar memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya sambil tetap memperhatikan mekanisme pasar. Sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF), yang dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam kerangka ini, inflasi menjadi sasaran utama (*overriding objective*). Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan penyempurnaan pada kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan dinamika perubahan dan tantangan ekonomi yang timbul, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitasnya (BI, 2019). Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan fiskal pemerintah juga menjadi salah satu fundamental ekonomi penting. Menurut Saragih (2016), kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi mempunyai bertujuan mencapai berbagai sasaran pembangunan di berbagai sektor dan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi alokasi anggaran negara bertujuan untuk mendanai pembangunan di berbagai bidang.
- b. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Fungsi stabilisasi ekonomi-makro, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu melalui upaya meredam siklus-bisnis atau fluktuasi ekonomi atau yang bersifat kontra siklus (*counter cyclical*) bahwa dalam kondisi perekonomian lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat *autonomous*, termasuk belanja barang dan/atau jasa serta belanja modal dapat memberi stimulus terhadap perekonomian untuk tumbuh tinggi.

Sasaran operasional kebijakan moneter tercermin dalam pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). (Saiyed, 2021) Perubahan dalam suku bunga PUAB ini diharapkan akan memengaruhi suku bunga deposito dan akhirnya suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia biasanya akan menaikkan tingkat suku bunga referensi jika inflasi di masa depan diperkirakan akan melebihi sasaran yang ditetapkan, sementara akan menurunkan tingkat suku bunga referensi jika inflasi di masa depan diperkirakan akan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (Saridawati, 2015). Otoritas moneter, sebagai pengontrol pasokan uang, menjalankan kebijakan moneter dengan menetapkan target yang ingin dicapai dan memilih

Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengendalian Inflasi, Kebijakan Moneter Dan Fiskal

instrumen kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai target tersebut.. Mahmud (2009) menjelaskan bahwa instrument-instrumen pokok kebijakan moneter tersebut antara lain:

- a. Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Operation) Kebijakan ini merupakan kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi dipasar terbuka. Apabila bank sentral ingin menambah supply uang, maka bank sentral akan membeli
- b. Obligasi dan apabila sebaliknya bank sentral akan menurunkan jumlah uang yang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.
- c. Penentuan Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*) Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (reserve) dengan kewajiban giral bank (*deman deposits*) yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut dengan uang tunai yang sama, maka bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
- d. Penentuan Suku Bunga Diskon (*Discount Rate*) Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir. Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit dibawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku dipasar bebas. *Discount rate* yang bank sentral kenakan terhadap peminjam ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika *discount rate* relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
- e. Moral Suasion Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank.

Dampak Pengendalian Inflasi Terhadap Perekonomian Dalam ekonomi Islam

Harus ada keterkaitan yang erat antara sektor moneter dan sektor riil, dengan sektor moneter secara tegas harus mengikuti perkembangan yang terjadi pada sektor riil (Karim, 2020). Di Indonesia, sistem keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang tercermin dari perkembangan instrumen moneter syariah sejalan dengan peningkatan kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Pertumbuhan ini tercermin dalam peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga Desember 2018 mencapai Rp 379.963 miliar, dan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp 329.277 miliar pada periode yang sama. Selain itu, instrumen moneter syariah seperti Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga hadir untuk mendukung likuiditas perbankan syariah (OJK, 2019). Karakteristik keuangan syariah menunjukkan adanya hubungan langsung antara sektor moneter dan sektor riil.

Dalam teori endogenous Islam, perkembangan sektor moneter merupakan cerminan dari perubahan yang terjadi dalam sektor riil. Kebijakan, baik itu kebijakan moneter maupun fiskal dalam ekonomi Islam, selalu bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mencapai produktivitas maksimal, dan pendekatan ini juga berlaku dalam pengelolaan permintaan uang (Karim, 2017). Peningkatan pembiayaan dari bank syariah yang ditujukan pada sektor riil akan berdampak pada produksi barang dan jasa dalam masyarakat. (Wahab & Mahdiya, 2023) Dengan peningkatan produktivitas, kebutuhan domestik kemungkinan besar akan terpenuhi, dan kemungkinan untuk melakukan ekspor barang ke luar negeri juga akan meningkat. Peningkatan dalam ekspor akan meningkatkan pendapatan negara melalui pendapatan devisa yang dihasilkan, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang modal dalam negeri. Seperti yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun, ketika suatu negara melakukan ekspor, kebutuhan domestik akan barang dan jasa telah terpenuhi.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter merupakan instrumen kunci dalam kebijakan politik ekonomi, baik dalam sistem ekonomi modern maupun dalam perspektif Islam. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan larangan terhadap bunga dalam Islam. Untuk memastikan sistem moneter berjalan dengan baik, otoritas moneter harus melakukan pengawasan menyeluruh terhadap keseluruhan sistem. Kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi makro untuk mencapai target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mengatasi inflasi, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan ekonomi makro. Dengan demikian, pentingnya peran pemerintah dan negara dalam mengambil langkah-langkah ekonomi guna mempertahankan stabilitas ekonomi sesuai dengan tantangan yang dihadapi, baik saat ini maupun di masa depan, dapat dipastikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah, A. (2020). *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Inflasi Dan Pengangguran (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2018 Dengan Pendekatan Kurva Phillips)*. Universitas Siliwangi.
- Ariani, A. M. (2022). *Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2010-2020*. Universitas Hasanuddin.
- Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2021). Peran Bank Indonesia Dan Pembangunan Hukum Di Bidang Moneter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 393–411.
- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik*. Prenada Media.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & others. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159.
- Fitria, V., & Anwar, S. (2020). Penerapan triple exponential smoothing dalam meramalkan laju inflasi bulanan Provinsi Aceh tahun 2019-2020. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(1), 23–38.
- Fuadi, A. (2020). Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(01), 1–12.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16.
- Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 264–284.
- Muda, R., Koleangan, R. A. M., & Kalangi, J. B. (2019). Pengaruh angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pengeluaran perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi di sulawesi utara pada tahun 2003-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01).
- Palapa, P., Kumaat, R. J., & Sumual, J. I. (2021). Pengaruh BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dan Inflasi Pada Masa Pandemic Covid 19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(5).
- RoZIAH, T. R., Septiani, R., Amapoli, E. V., & others. (2023). Inflasi Di Indonesia: Perkembangan Dan Pengendaliannya. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(01), 9–18.
- Saiyed, R. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 5(1), 42–49.
- Sari, A. N. W., Astuti, R. P., Afif, M. K. K., Rahmawati, N. P., & Pusparani, N. A. (2024).

- Teori Kebijakan Moneter. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 165–168.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340.
- Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 199–210.
- Waasi, N. (2023). *Konsep Dasar Ekonomi Makro Syariah*.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.